



2025

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report



PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI

Nomor : 340B/Dir-SP/IV/2026
Tanggal : 16 April 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Provinsi Bali
Jl. WR Supratman No. 1 Denpasar
Bali 80114

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI
Tahun 2025

Mengacu pada POJK No. 51 Penerapan Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif ditegaskan BPR wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Oleh karenanya, menunjuk perihal dimaksud kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI *f yal*



I Ketut Tantra, SE., MM
Direktur Kepatuhan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Batubulan, 16 April 2026

al PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI *fy.*



Ni Wayan Tantri, SH
Komisaris



I Ketut Tantra, SE., MM
Direktur Kepatuhan



Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	7
2.1. Kinerja Ekonomi	7
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	10
2.3. Kinerja Sosial	11
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	12
3. Profil Bank	14
4. Penjelasan Direksi	19
5. Tata Kelola Keberlanjutan	27
Umpan Balik	32



Kata Pengantar

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga kredit.

Dalam hal ini PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara luring (*offline*) paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.



1.

Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai dengan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 mengenai Keuangan Berkelanjutan pasal 10, BPR/BPRS diharuskan secara substantif menyiapkan dan menyerahkan Laporan Berkelanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu, BPR/BPRS harus menyusun dan **menyerahkan Laporan Keberlanjutan (LK) atau Sustainability Report (SR) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan merupakan dokumen yang disampaikan kepada publik yang mencakup hasil kinerja ekonomi, keuangan, sosial, serta aspek Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melaksanakan bisnis berkelanjutan (*sustainability report*).

Berdasarkan Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, format penyusunan Laporan Keberlanjutan ditetapkan sebagai berikut:

1. Uraian strategi keberlanjutan
2. Ringkasan pelaksanaan aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)
3. Profil singkat BPR/BPRS
4. Penjabaran dari direksi
5. Pengelolaan berkelanjutan



6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik untuk pembaca, dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahunan sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI tahun 2025 disusun sesuai dengan standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/ POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Pengaturan konten Laporan ini mengikuti kerangka POJK 51/ POJK.03/2017 dan dirancang berdasarkan dua prinsip utama, yakni prinsip isi serta prinsip kualitas.

Isi prinsip mencakup:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan ini disusun sejalan dengan konteks kerangka keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Data disajikan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif guna menambah keutuhan bagi pembaca.



Prinsip kualitas dapat dirumuskan sebagai:

1. Keseimbangan: Data mengenai capaian dan prestasi, beserta tantangan, disajikan sesuai kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disajikan dalam laporan harus mencakup tiga (3) tahun terakhir.
3. Keakuratan: Semua angka dan data telah diverifikasi secara internal oleh Bank, sehingga keakuratannya dapat dipastikan.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini dikirim tepat pada waktunya bersamaan dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Laporan menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami.

Topik material yang dibahas dalam laporan ini merupakan isu-isu yang telah diprioritaskan oleh organisasi dan disertakan dalam dokumen. Prioritas ditentukan berdasarkan dimensi seperti dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak yang tercatat mencakup nilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu signifikan yang memengaruhi PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, serta 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dirumuskan oleh PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI adalah:

1. **Investasi dengan tanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang menilai aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan, guna memitigasi risiko lebih efektif. Kami menegakkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang bebas dampak negatif terhadap lingkungan, dengan menilai potensi risiko dari usaha yang dibiayai Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menanamkan prinsip tersebut melalui kebijakan keberlanjutan yang tersusun dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), yang menjadi pijakan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI dalam melaksanakan kegiatan usaha bank secara berkelanjutan.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup;** Berbekal prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), kami menilai risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Di luar risiko finansial, kami juga menerapkan manajemen risiko khusus untuk menilai risiko kredit atau pinjaman yang berhubungan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan, guna menghindari dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan—ekonomi, lingkungan, dan sosial— dengan landasan prinsip- prinsip GCG (Good Corporate Governance). (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyiapkan laporan informatif yang mencakup strategi, tata kelola, kinerja, serta prospek Bank yang dapat diakses secara mudah oleh semua *stakeholder* melalui situs web PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI di <https://www.bprgodital.co.id>
6. **Prinsip Inklusif;** Bank berkomitmen menyediakan produk dan/ atau jasa yang mudah diakses serta terjangkau bagi semua nasabah. Bank menjamin ketersediaan layanan ini



sehingga setiap warga dapat memperoleh akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI.

7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas** ; Dalam merancang program keberlanjutan, kami mengacu pada sektor- sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Langkah ini diambil untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta mendukung inisiatif pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi**; Kami bersedia untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan lembaga atau pemerintah setempat dalam rangka memperkuat strategi keberlanjutan Bank melalui Bisnis Berkelanjutan. Hal ini tercermin dari keanggotaan perusahaan di Perbarindo serta partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.



Sedangkan **tiga fokus utama RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Meningkatkan produk maupun jasa keuangan berkelanjutan, termasuk melakukan identifikasi serta pemantauan terhadap portofolio pembiayaan Bank yang mendukung keuangan berkelanjutan.
2. Penguatan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui peningkatan awareness tentang keuangan berkelanjutan bagi pegawai dan nasabah serta penerapan praktik keuangan berkelanjutan di sektor usaha utama Bank.
3. Melakukan penyesuaian pada struktur organisasi, pengelolaan risiko, tata kelola, serta standar prosedur operasional. Sebagai contoh, menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, menyesuaikan kebijakan internal bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, dan kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan dirancang dengan memperhatikan visi dan misi Bank dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan tidak sekadar memenuhi regulasi, melainkan juga menjadi strategi untuk mewujudkan visi Bank, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi target utama Bank dalam layanan jasa keuangan diharapkan dapat menurunkan kesenjangan sosial yang ada. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan ramah lingkungan, Bank berusaha memperkuat perannya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Inisiatif ini terealisasi lewat berbagai langkah, termasuk penyusunan rencana kerja dan pengembangan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah mengadopsi prinsip-prinsip *go green company* sejak pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:



1. Menyebarluaskan kesadaran efisiensi air di semua toilet kantor BPR dengan menempatkan pamflet "Gunakan air seperlunya", "Hemat air", atau "Matikan air setelah selesai digunakan".
2. Menggerakkan kesadaran akan lingkungan kerja yang lebih sehat dengan semboyan "BERSIH itu SEHAT" melalui penempatan pamflet di lokasi strategis yang mudah dilihat.
3. Melaksanakan program "Hemat Energi" dengan membatasi penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja serta mematikan lampu pada ruangan yang tidak beraktivitas.
4. Cara memakai *tumbler* menjadi alternatif bagi gelas air minum atau botol air yang sudah dikemas.



2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)			
Total Aset	806.747.404.491	756.428.927.851	691.708.384.596
Aset Produktif	803.807.527.793	736.766.360.655	660.885.781.067
Kredit/Pembiayaan Bank	564.966.833.012	550.122.783.788	540.903.578.890
Dana Pihak Ketiga	238.840.644.781	186.643.576.867	119.982.202.177
Pendapatan Operasional	258.909.932.872	95.232.620.479	72.590.918.089
Beban Operasional	245.014.238.613	77.615.892.662	66.301.028.829
Lab Bersih	10.288.326.162	13.794.337.388	4.448.210.802

**Rasio Kinerja (Dalam %)**

Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	21,96	17,71	15,21
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	11,88	12,92	3,75
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	9,93	10,54	3,22
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0	0	0
NPL/NPF Gross	16,59	17,31	4,59
NPL/NPF Nett	14,87	15,89	4,03
Return on Asset (ROA)	1,84	2,51	0,72
Return on Equity (ROE)	21,63	35,88	15,87
Net Interest Margin (NIM)	5,35	3,35	4,33
Rasio Efisiensi (BOPO)	94,63	81,50	91,34
Loan to Deposit Ratio (LDR)	122,17	88,93	14,17
Cash Ratio	29,52	22,45	92,57

Aset dan laba PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
a.1. DPK	2	2	2	2
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	1	1	1	1
b.1. Kredit / Pembiayaan	1	1	1	1
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-



LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025 PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI

Website: www.bprkanti.com, Email: bprkanti@gmail.com

Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)

a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	450.443.118.508	462.448.039.227	433.054.198.211	359.486.418.959
a.1. DPK	450.443.118.508	462.448.039.227	433.054.198.211	359.486.418.959
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	565.319.832.894	564.966.883.012	550.122.783.788	540.903.578.890
b.1. Kredit / Pembiayaan	565.319.832.894	564.966.883.012	550.122.783.788	540.903.578.890
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	450.443.118.508	462.448.039.227	433.054.198.211	359.486.418.959
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	565.319.832.894	564.966.883.012	550.122.783.788	540.903.578.890
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	100%	100%	100%	100%
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	100%	100%	100%	100%
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

A f y ad

**Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)**

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	565.319.832.894	564.966.883.012	550.122.783.788	540.903.578.890
Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	565.319.832.894	564.966.883.012	550.122.783.788	540.903.578.890

Total outstanding penyaluran kredit ke sektor UMKM di tahun 2025 tercapai Rp564.966.883.012 dari target Rp565.319.832.894 dengan tingkat realisasi sebesar 99.94%



2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSJL

Dalam usaha mewujudkan operasional bank yang ramah lingkungan, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi dan aksi nyata sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan agar tujuan Perusahaan terwujud. Hal ini diwujudkan dengan menciptakan operasional kantor yang ramah lingkungan, yaitu mengelola penggunaan bahan baku/material, energi (listrik, air, dan energi lainnya) secara efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPR.



Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Dalam upaya kelestarian lingkungan agar tetap terjaga, perusahaan menerapkan pengurangan penggunaan bahan sekali pakai. Contohnya mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing. Perusahaan juga menerapkan pemilahan sampah yang diharapkan mampu mempermudah dalam upaya pengelolaan kembali (daur ulang) sampah menjadi barang pakai kembali atau menjadi pupuk di kemudian harinya.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar (Liter)	5.000	4.369	4.065	3.229
b. Penggunaan Listrik (kWh)	10.000	9.109	9.722	9.974
c. Penggunaan Air (m3)	160	104	139	155
d. Penggunaan Kertas (kg)	300	432	250	249

**Total Emisi**

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi**Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi**

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas keuangan dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai, sehingga setiap gaji disesuaikan dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Bali.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referal Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI selalu memantau kesejahteraan karyawannya dengan menetapkan pengupahan sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Bali.



Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	160	158	152	155
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	5	5	5	5
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	2	2	2	2
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	3	3	3	3
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI turut berperan dalam menyalurkan sebagian laba yang dianggarkan khusus untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	300.000.000	276.665.500	166.738.800	107.378.300
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI terus berupaya memastikan eksistensinya berkembang lebih pesat. Salah satu langkahnya adalah inovasi dan pengembangan produk serta layanan, dengan memperhatikan tren teknologi terkini yang cepat berkembang. Ini menjadi katalisator perubahan perilaku masyarakat modern yang mengharapkan transaksi perbankan yang mudah, aman, dan nyaman.

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI melakukan inovasi dengan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perusahaan. Inovasi yang berhasil dibuat tahun 2025 adalah Pengembangan produk/ jasa yang dilakukan BPR Sukawati Pancakanti meliputi Program Kredit dan Tabungan PT. BPR Sukawati Pancakanti. Disamping itu, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI juga memperkenalkan program *Credit Scoring*, Aplikasi Pemantauan Kredit, serta Laporan Tahunan berbasis WEB yang berkolaborasi dengan Vendor.

**Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan**

Semua produk dan jasa yang disediakan oleh PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah mematuhi seluruh persyaratan serta memperoleh persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, memastikan keamanan bagi nasabah. Untuk mengurangi risiko kerugian sebaik mungkin, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI secara berkelanjutan memberi informasi kepada nasabah tentang potensi risiko, termasuk risiko pasar dan fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti formulir Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) maupun pertemuan tatap muka.

Sejalan dengan regulasi yang berlaku, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI secara rutin melaksanakan program literasi serta inklusi keuangan, sehingga calon maupun nasabah memperoleh pemahaman yang tepat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi sesuai kebutuhan sambil menyadari profil risiko yang melekat pada produk dan jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI telah melakukan penilaian atas setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan merujuk pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI akan menyediakan dana dengan prinsip kehati-hatian, termasuk upaya mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Langkah ini berakibat tidak adanya dampak negatif pada produk dan jasa yang dikeluarkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI di tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI maupun perintah regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI belum melakukan survei kepuasan pelanggan pada produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, tidak tercatat adanya komplain atau pengaduan baik dari nasabah maupun masyarakat terhadap produk dan jasa bank yang merusak lingkungan hidup hingga menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat.

**3.****Profil Bank**

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI
Alamat	Jl. Letda I Dewa Rai Hadnyana. ex Jl. Batuyang No. 67B, Batubulan, Gianyar, Bali, 80582
Nomor Telepon	0361-8461345 , 290045
Email	bprkanti@gmail.com
Website	www.bprkanti.com

Skala Usaha Bank

PT. BPR Sukawati Pancakanti yang lebih dikenal dengan sebutan BPRKanti, berdiri dengan akte notaris Nomor : 151 tanggal 27 September 1989 notaris I Putu Chandra, SH. Akte pendirian/ anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor : C2-10594.HT.01.01. TH 1989 tertanggal 18 Nopember 1989 berkedudukan di Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Bali. Dengan ijin prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1029/ MK.13/1989 tertanggal 25 Agustus 1989.

Pendiri adalah Bapak Ketut Gamia dan Bapak Ketut Sudama dengan berkantor di Pasar Sukawati hanya dengan 1 (satu) meja, sehingga tahun 1995 diadakan relokasi kantor ke Jalan Batuyang No 67 B Batubulan sampai sekarang sebagai kantor pusat.

Selama tahun 1995-2010 membuka 3 kantor kas di daerah Gianyar yaitu di Sukawati tepatnya di Pasar Seni Sukawati, Gianyar Kota, dan Di Ubud dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di Daerah Gianyar.

Pada tahun 2011 membuka kantor cabang di Kota Denpasar karena modal setor sebesar Rp4 Miliar sehingga OJK menyetujui untuk membuka kantor cabang adalah satu-satunya BPR yang pertama kali disetujui buka cabang di Kota Denpasar, karena sebelumnya hasil kajian regulasi bahwa Kota Denpasar sudah penuh dengan perbankan.



Selanjutnya adanya perubahan anggaran dasar PT. BPR Sukawati Pancakanti dengan akte notaris Nomor: 200 tanggal 29 Agustus 2001 notaris I Putu Chandra, SH. untuk memperbesar modal dasar dari Rp200.000.000,- menjadi Rp1.500.000.000,- telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.09837.HT.01.04.TH 2001 tertanggal 3 Oktober 2001.

Dan perubahan Akta No. 70 tanggal 18 Juni 2008 untuk penyesuaian dengan UU PT No. 40 Tahun 2007, kemudian berdasarkan akta perubahan terakhir No. 75 tanggal 15 September 2008 Notaris I Putu Chandra, SH terjadi peningkatan modal dasar bank dari sebesar Rp1.5 miliar,- menjadi sebesar Rp4 miliar ,- dengan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor : AHU-78246.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan persetujuan dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 10/1056/ DKB/ IDAd/ Dpr tanggal 16 Desember 2008.

Dalam rangka memperkuat permodalan sehingga pemegang saham seluruh laba disetorkan kedalam bentuk modal setor sehingga modal setor menjadi Rp4.000.000.000,- dengan modal dasar menjadi Rp10.000.000.000,- sesuai dengan akta No. 106 tanggal 30 Maret 2010 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-19390.A.H.01.02. Tahun 2010, tanggal 15 April 2010.

Untuk memperkuat permodalan dalam rangkaantisipasi persaingan yang begitu ketat, maka pemegang saham sepenuhnya deviden disetorkan kemodal setor sebesar Rp3.000.000.000,- sehingga modal disetor menjadi Rp7.000.000.000,- sesuai dengan akta No. 28 tanggal 14 Februari 2012 dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031052.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 12 April 2012.

Sesuai Akta No. 32 tanggal 12 Agustus 2014 Notaris I Putu Chandra, SH modal setor menjadi Rp10.000.000.000,- telah dicatat pada database Kementerian Hukum dan HAM No : AHU-06535.40.20.2015 tertanggal 14 Agustus 2014, dan pada tanggal 24 Desember 2014 kembali penambahan modal setor secara tunai sebesar Rp2.400.000.000,- dan modal setor menjadi Rp12.400.000.000,-.

Akhirnya berkat kegigihan pengurus untuk membesarkan perusahaan melanjutkan membuka kantor cabang di Kabupaten Badung adalah pendapatan Kabupaten yang terbesar di Propinsi Bali yaitu pada tahun 2014 persetujuan OJK membuka Kantor Cabang Badung di wilayah Sempidi.

Dari kedua kantor cabang tersebut yaitu Cabang Sempidi terus mengembangkan sayap karena luas wilayahnya sehingga tahun 2015 membuka Kantor Kas di Kuta dan di Kerobokan, sedangkan pada tahun 2017 membuka kantor kas di Pemogan dengan berinduk di Cabang Denpasar.



Seiring dengan perkembangan usaha juga tahun 2018 membuka kantor kas di perbatasan antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Tabanan.

Karena Pemegang saham fokus untuk membesarkan banknya sehingga deviden jarang dibagi yang berakibat modal setor meningkat menjadi Rp24.000.000.000,- pada bulan Januari 2016 yaitu dengan Akte No. 68 tanggal 22 Januari 2016 Notaris I Putu Chandra, SH dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0006009 tertanggal 25 Januari 2016, pada tahun 2017 dalam rangka memperkuat posisi permodalan bank, pemegang saham kembali melakukan peningkatan modal dengan melakukan penambahan modal setor sebesar Rp1.000.000.000,- sehingga modal setor menjadi Rp25.000.000.000,- selain itu melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp100.000.000.000,- sesuai dengan akta notaris I Putu Chandra, SH No. 46 tertanggal 20 Januari 2017 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- 0002244.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017. Dilanjutnya dengan Akta No. 45 tanggal 29 Juli 2022 Notaris I Putu Chandra, SH dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU- AH.01.09-0040410 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan pengurus baru dan perpanjangan pengurus.

Sedangkan penambahan modal setor menjadi Rp45.000.000.000,- sesuai dengan Akta No.22 tanggal 17 Mei 2023 Notaris I Putu Chandra, SH dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09-0119418 tanggal 23 Mei 2023.



Strategi dan Kebijakan

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang cepat, kami menerapkan berbagai strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan tersebut merupakan keputusan yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan menuangkan ide dan formulasi yang dibutuhkan Bank sebagai Kunci Utama dalam mempertshsnksn kinerjs Bank.

**Total Aset dan Kewajiban**

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp806.204.533.503 mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp114.496.148.907 (14.20%). Demikian juga kewajiban mengalami peningkatan sebesar Rp.740.932.544.265 dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp91.552.083.794 (12.36%)

Deskripsi	2025	2024	2023
Aset	806.204	756.443	691.708
Kewajiban	740.932	700.476	649.380

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 158 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Provinsi Bali. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama Pemegang Saham	Nominal	%
1.	I Nyoman Oka Sunarya, S.Kom	11.410.000.000	25.36
2.	I Wayan Suranala, ST	11.250.000.000	25.00
3.	Made Arya Amitaba, MM.	11.190.000.000	24.87
4.	Ni Made Putri Suandewi, MM.	11.150.000.000	24.77
	Total	45.000.000.000	100.00

Produk dan Layanan

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	1. Tabungan Simpel
	2. Tabungan Suputra
	3. Tabungan Sahabat Kanti
	4. Tabungan SiMuda
	5. Tabungan Bersama BPR
	6. Tabungan Bersama Koperasi
Deposito	1. Deposito Berani
	2. Deposito Berjangka
Kredit	1. Kredit UMKM



Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



4.

Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai berkelanjutan dengan menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya dan unggul dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Nilai berkelanjutan ini diimplementasikan lewat beberapa strategi utama, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia agar selaras dengan kebutuhan strategis, mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam manajemen risiko, serta menumbuhkan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya di sektor UMKM. Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, sekaligus memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Khususnya, sektor ini memainkan peran vital dalam mengasah sumber daya manusia demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.





Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk jangka panjang selama lima tahun. Selain itu, BPR juga menetapkan Rencana Aksi Jangka Pendek satu tahun di tahun 2025.

Bank menetapkan target agar semua pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan mengimplementasikan operasional Perbankan Hijau (*green banking*).

Laporan Keberlanjutan ini memuat komitmen, strategi dan pencapaian kami dalam Keuangan Berkelanjutan. Berikut adalah komitmen kami:

1. Penggunaan prinsip kehati-hatian di bank (*prudential banking*) saat melaksanakan fungsi serta aktivitas usaha, khususnya pada pemberian kredit.
2. Mengelola kegiatan Bank dengan lebih efisien serta mendukung keberlanjutan lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf dalam pemahaman sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya di setiap kegiatan usaha Bank.
4. Mengimplementasikan perbankan inklusif melalui m Menyediakan dukungan akses keuangan bagi semua orang.
5. Bergabung dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa memperkuat strategi keberlanjutan dengan fokus khusus pada mitigasi risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasional. Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, BPR tidak lepas dari beragam risiko, meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko-risiko tersebut telah ditangani secara optimal melalui berbagai upaya mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Bank.



Saat memulai penempatan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan, tantangan terbesar terletak pada komunikasi dan upaya membuat semua pemangku kepentingan menyadari betapa pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasi dan bisnis perusahaan. Meski demikian, kami yakin di masa depan akan terbuka peluang besar dalam penyaluran dana terkait Keuangan Berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI berupaya meningkatkan layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi serta kemitraan dengan pemerintah, regulator, dan asosiasi untuk menambah nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial, guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI akan terus berfokus pada penerapan keuangan berkelanjutan, dimulai dari peningkatan pemahaman semua level organisasi tentang keuangan berkelanjutan, membentuk budaya kerja yang mengutamakan aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas sehari-hari, serta mengembangkan produk keuangan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memperluas portofolio produk berkelanjutan.

Untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan, penting agar semua pihak menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mengatasi isu-isu lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kami turut berkontribusi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat akibat kegiatan operasional serta bisnis kami.



Apresiasi

BPR mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah berperan serta dalam implementasi prinsip Keuangan Berkelanjutan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pihak. Kami berharap semua pemangku



kepentingan akan terus memberikan dukungan dan kerjasama, sehingga kami dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mengelola isu-isu keberlanjutan dengan baik.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala di pelaksanaan keuangan berkelanjutan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI umumnya terkait dengan kesiapan internal organisasi untuk bertransisi dari pencapaian laba cepat menjadi pembangunan yang komprehensif, menutup unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple bottom line*)

2. Operasional Bank

Dilihat dari perspektif operasional PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan terletak pada penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) dalam aktivitas harian. Laporan tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari proses pemberian kredit, layanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Sering kali, terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang jelas dan menyeluruh untuk memasukkan unsur keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, serta Kebijakan Penerapan Tata kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. **PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai** spesialis ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau *Sustainability Officer*. Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. **Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial.** Analis kredit biasanya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa mengevaluasi potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, maupun kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.



5. Lainnya

Salah satu tantangan tambahan yang setara beratnya adalah **profil dan kesiapan debitur**. Sebagian besar pelanggan BPR merupakan pelaku mikro dan kecil yang sering belum sadar atau mampu mengimplementasikan praktik usaha berkelanjutan. Banyak usaha tetap bersifat informal, sehingga sulit mempersiapkan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI memahami bahwa pelaksanaan keuangan berkelanjutan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, melainkan bagaimana menerapkan prinsip tersebut secara realistis dengan sumber daya bank yang terbatas.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan komitmen manajemen** : Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arahan strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. *Tone from the top* (sikap, tindakan, dan perilaku etis dari pemimpin tertinggi organisasi, dewan direksi, manajemen senior) penting agar setiap unit memahami bahwa keberlanjutan merupakan bagian integral strategi bisnis, bukan sekadar inisiatif tambahan
2. **Menyusun kebijakan dan prosedur yang mudah dipahami** : BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, contohnya daftar sektor terlarang, klasifikasi risiko rendah– tinggi, serta *checklist* singkat bagi *account officer* . Pendekatan ini memudahkan pelaksanaan.
3. **Peningkatan kapasitas SDM** : Melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.
4. **Integrasi ke proses kredit** : Keberlanjutan diintegrasikan sejak tahap analisis hingga monitoring. Proses tidak perlu kompleks, cukup memastikan dampak lingkungan dan sosial dipertimbangkan.
5. **Pengembangan produk serta insentif** : Pemberian suku bunga atau persyaratan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau peningkatan efisiensi energi.
6. **Meningkatkan mutu data serta penyusunan laporan** : Meskipun infrastruktur TI terbatas, BPR dapat memulai dengan *template manual* untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.
7. **Edukasi dan pendampingan nasabah** : Karena sebagian debitur masih belum mengerti isu keberlanjutan, bank bisa menyajikan sosialisasi singkat tentang keuntungan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.



8. **Kerja sama dengan pihak eksternal :** BPR dapat membentuk kemitraan dengan dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping untuk mendukung proses penilaian dan pembinaan debitur.
9. **Penerapan bertahap berdasarkan prioritas :** Implementasi Keuangan Berkelanjutan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI tidak perlu sempurna sekaligus. Penekanan dapat dimulai pada sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling realistis di area operasional.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

Secara eksternal, terutama yang berasal dari kebijakan serta kerangka regulasi pemerintah dan regulator, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI kerap menghadapi dinamika kompleks ketika mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Meski kebijakan nasional mengarahkan pada praktik ESG, penerapannya di bank berskala kecil seperti BPR memerlukan penyesuaian signifikan.

Berbagai tantangan yang sering dirasakan antara lain sebagaimana berikut.

1. **Perubahan dan perkembangan regulasi terus berlangsung dengan cepat :** Ketentuan tentang keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau selalu berubah. BPR memerlukan waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.
2. **Permintaan laporan yang semakin terperinci :** Permintaan data portofolio berkelanjutan biasanya membutuhkan pemetaan sektor dan data debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, hal ini menjadi beban tambahan.
3. **Standar yang cenderung merujuk pada praktik bank umum :** Sebagian pedoman didesain dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya di BPR membutuhkan penyederhanaan atau interpretasi khusus.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menghadapi tantangan eksternal, yang dapat dipetakan menjadi hal-hal berikut, sesuai dengan gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

Skala Nasional

Pada level nasional, hal utama yang sering dibahas berkaitan dengan struktur ekonomi serta kesiapan para pelaku usaha.

Pertama, **ketergantungan pada sektor-sektor tertentu** yang belum sepenuhnya bersahabat



lingkungan. Pergeseran menuju praktik berkelanjutan memerlukan dana dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan hijau belum berkembang secara cepat.

Kedua, **kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM**. Mayoritas pelaku usaha cenderung menitikberatkan pada kelangsungan operasional jangka pendek, sehingga pengalokasian dana ke teknologi atau proses berkelanjutan tidak dianggap prioritas.

Tingkat Wilayah (daerah/regional)

Pada tingkat regional, perbedaan kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat menentukan.

Banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses teknologi hijau, kurangnya konsultan atau lembaga pendukung, serta ketidakberlanjutan rantai pasok.

Di samping itu, fokus pembangunan di wilayah sering kali mengutamakan penciptaan pekerjaan secara cepat, sehingga faktor lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama. prioritas pembangunan daerah

3. Lainnya

1. **Ciri khas serta kematangan nasabah.** Sebagian besar debitur BPR berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungan masih terbatas. Banyak usaha belum memiliki izin, standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik, sehingga mempersulit bank dalam mengumpulkan informasi untuk menilai aspek keberlanjutan.
2. **Pandangan serta penolakan yang diungkapkan oleh pihak peminjam.** Persyaratan tambahan atau pertanyaan mengenai dampak lingkungan seringkali dipandang sebagai hambatan dalam memperoleh pinjaman. Bila tidak diatasi dengan tepat, hal tersebut dapat menurunkan minat calon debitur.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI mengambil langkah-langkah seperti memperkuat komunikasi dengan regulator, aktif berpartisipasi dalam forum industri/ perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya umum yang biasanya dilakukan oleh PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, antara lain:

1. **Berikan edukasi dan literasi kepada nasabah :** BPR dapat menyampaikan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, keuntungan legalitas, dan potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.



2. **Pendampingan bagi UMKM :** Tidak cukup sekadar meminta dokumen saja, bank turut membimbing debitur memahami apa saja yang perlu diperbaiki. Contohnya memberikan arahan pengelolaan limbah sederhana, penjaminan keselamatan kerja, atau cara memperoleh izin usaha.
3. **Membangun kemitraan lokal :** Kerja sama dengan dinas pemerintah daerah, koperasi, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping dapat membantu penyediaan informasi teknis dan pembinaan tanpa seluruh beban ada pada bank.
4. **Menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pasar secara realistis :** Sebagai gantinya menunggu proyek hijau berskala besar, BPR bisa memfasilitasi pembiayaan yang memberikan dampak sederhana namun signifikan, misalnya bagi kegiatan UMKM, peningkatan efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, atau pengurangan sampah.
5. **Meningkatkan dialog dengan badan regulator :** Dengan memanfaatkan forum industri atau asosiasi, BPR dapat meminta klarifikasi, menukar praktik terbaik, dan menyampaikan hambatan di lapangan agar pelaksanaan lebih menyesuaikan diri dengan kapasitas.
6. **Perlakuan sederhana terhadap persyaratan :** Agar minat debitur tetap terjaga, bank dapat menyiapkan checklist atau klasifikasi risiko yang sebanding dengan skala usaha.
7. **Meningkatkan citra dan komunikasi publik :** Dengan menegaskan komitmen pada pengelolaan dana yang bertanggung jawab, bank dapat memperkuat kepercayaan publik serta menarik nasabah yang memiliki pandangan serupa.



5.

Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan proses pengelolaan yang mengimplementasikan lima pilar tata kelola, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI No. SK 089/Dir-SP/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 mengenai Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, disusun sebagai berikut:

1. RUPS merupakan bagian dalam perusahaan yang memiliki otoritas yang tidak diamanahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris merupakan bagian dalam perusahaan yang berwenang melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Direksi merupakan bagian dalam terpenting dalam perusahaan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Bank demi kepentingan Bank, mengikuti tujuan dan maksud Bank serta mewakili Bank, sesuai ketentuan Anggaran dasar.

Dalam implementasi *good corporate governance*, Perseroan telah menyusun kerangka kerja (*frame work*) yang menggabungkan tiga komponen, yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja serta operasional ini diharapkan dapat menghasilkan perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkelanjutan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris meliputi pengawasan aktif atas pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan berbasis pada anggaran dasar Bank dan regulasi perundang-undangan lain, yakni :



1. Memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Keuangan Berkelanjutan, yang termasuk dalam kebijakan khusus Bank.
2. Menyetujui dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Menetapkan persetujuan untuk Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
4. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Direksi dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam penerapan program Keuangan Berkelanjutan berpedoman pada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lain, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyampaikan rencana kebijakan Keuangan Berkelanjutan beserta revisinya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyiapkan dan menyampaikan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) ke Dewan Komisaris.
3. Menyusun serta mengajukan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris
4. Menyampaikan RAKB kepada para pemegang saham serta seluruh tingkatan organisasi di Bank.
5. Mengawasi pejabat eksekutif di satuan kerja yang menerapkan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.



Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dengan modal inti Rp 54 milyar, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI bertekad menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/ POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.



Penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pimpinan tertinggi. Namun, saat pelaksanaannya, Direktur Utama menunjuk Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan, yang mengawasi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan. Tim ini bertugas menyusun, memantau, dan menyampaikan pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertugas menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta melaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Berkelanjutan, berperan sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** merinci sebagai berikut:

Ketua (Direktur yang Menjabat Fungsi Kepatuhan):

1. Mengecek bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah menjalankan Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan bersama-sama mengajukan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta laporan pemantauan Keuangan Berkelanjutan ke Direksi, sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait mengenai hal-hal berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyerahkan hasil pelaksanaan semua tugas dan tanggung jawab tersebut pada poin (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi, dan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
3. Menyerahkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta Laporan Berkelanjutan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	-	-	-
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	4	4	5

**Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan****Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan**

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	3	-	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	5	6	6
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	12	6	5
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	33	39	11

Pembekalan dilaksanakan melalui pelatihan yang dihadiri seluruh anggota Tim, dengan materi yang meliputi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan serta kategori kegiatan yang termasuk dalam KUB. Sehingga, Bank bertujuan untuk memperluas portofolio produk KUB di masa depan.

**Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Bank berupaya menggabungkan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial ke dalam sistem risiko internalnya, melalui pembuatan kebijakan kredit serta prosedur yang terkait dengan portofolio produk yang masuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur ini telah menjadi elemen penting dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank, dengan target pelaksanaan pada tahun 2025.

Bank akan secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan setiap program dapat terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang ditetapkan.



Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam menerapkan **keuangan berkelanjutan**, peran pemegang saham di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menentukan arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, serta tingkat komitmen pemegang saham BPR Digital yang tinggi mendorong PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan keberlanjutan yang konsisten dijalankan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi kunci karena ia berfungsi sebagai pembuat kebijakan, regulator, serta penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat membangun iklim yang mendukung PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI untuk menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif, sambil tetap menjaga kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK telah mengeluarkan panduan teknis, praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini memudahkan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional harian.

Akademisi

1. Di implementasi **keuangan yang berkelanjutan**, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI memperkaya pengetahuan serta referensi dari para akademisi, sehingga bank dapat beroperasi berdasarkan fondasi ilmiah dan terus meningkatkan kualitasnya.
2. Para akademisi juga memproduksi penelitian terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan bagi PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI dalam merancang kebijakan.

Praktisi

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI turut berbagi pengalaman bersama praktisi perbankan senior yang sudah lebih lama terlibat dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan. Diharapkan, pelajaran dari bank atau lembaga lain dapat membantu PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI memahami strategi yang sudah terbukti efektif, termasuk metode sederhana untuk menggabungkan ESG tanpa memberatkan operasional.

**Pegawai**

Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan** di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI, pegawai menjadi ujung tombak yang memutuskan apakah kebijakan itu dapat dilaksanakan atau hanya tetap menjadi dokumen. Walaupun direksi mampu menentukan strategi, pelaksanaan harian berada pada tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, dan fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan **Keuangan Berkelanjutan**, nasabah tidak hanya sekadar penerima Kredit / Pembiayaan, melainkan juga mitra yang memengaruhi dampak nyata kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tindakan nasabah setelah memperoleh kredit akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai tempat koordinasi serta pertukaran praktik unggul antar BPR. Melalui forum ini, bank dapat mengakses contoh pelaksanaan, ikut serta dalam pelatihan bersama, dan menyuarkan kendala kepada regulator.

Umpan Balik

Dengan tujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa depan, PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI memperkenalkan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan. Lembar ini diharapkan memfasilitasi pembaca dan pengguna untuk menyampaikan usulan, umpan balik, opini, dan lain-lain, sehingga membantu pengembangan kualitas pelaporan berikutnya.

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI membuka akses informasi yang luas bagi semua pemangku kepentingan, investor, maupun siapa saja yang ingin memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini melalui kontak berikut:

Bapak I Made Murdita
Kepala Divisi Kepatuhan

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI
Jl. Letda I Dewa Rai Hadnyana
ex Jl. Batuyang No. 67B, Batubulan,
Gianyar, Bali 80582.
Telephone : 0361-8461345 , 290045
E-mail : bprkanti@gmail.com

Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 bagi BPR dengan modal inti Rp 54 Miliar merupakan langkah pertama, sehingga belum memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar informasi yang disajikan menjadi jelas dan bermanfaat bagi semua pembaca.



LAPORAN DEMOGRAFI
PEGAWAI PT. BPR SUKAWATI
PANCAKANTI TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Pejabat Eksekutif	7	5	12	7,59%
2	Kepala Bagian	14	19	33	20,89%
3	Pelaksana	67	42	109	68,99%
4	Lainnya / Tidak Terdefinisi	2	2	4	2,53%
	Jumlah	90	68	158	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	S2	6	3	9	5,70%
2	S1	50	47	97	61,39%
3	D3	4	4	8	5,06%
4	SLTA	26	14	40	25,32%
5	SLTP	4	0	4	2,53%
	Jumlah	90	68	158	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Tetap	75	61	136	86,08%
2	Kontrak	15	7	22	13,92%
	Jumlah	90	68	158	100%

g f y d



4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Di Atas 50 Tahun	16	12	28	17,72%
2	41 s/d 50 Tahun	33	17	50	31,65%
3	31 s/d 40 Tahun	25	22	47	29,75%
4	21 s/d 30 Tahun	16	17	33	20,89%
	Jumlah	90	68	158	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Generation X 1965 - 1980	35	17	52	32,91%
2	Generation Y (millennials) 1981 - 1996	26	56	82	51,90%
3	Generation Z 1997 - 2012	13	11	24	15,19%
	Jumlah	74	84	158	100%

Handwritten signature: S. P. N. d.



Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

Laporan keberlanjutan terkait materi dan informasi mudah dipahami, lengkap dan transparan.

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

.....
.....

g f y d



Profil Anda

Nama : Ni Kadek Hanny Etianita
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Institusi/Perusahaan : Lembaga Keuangan BPR Sukawati Pancakanti
Kontak (telepon, e-mail) : kadekhanny15@gmail.com

Kategori Pemangku Kepentingan

- Pemerintah Nasabah Karyawan Mitra Usaha
 Media Masyarakat LSM Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI
JL. LETDA I DEWA RAI HADNYANA NO 67B
BATUBULAN GIANYAR
Telepon : 0361-8461345
Website : www.bprkanti.com
E-mail : bprkanti@gmail.com

afyal